



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Laporan Kinerja BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKj Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Februari 2026

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCAN DAERAH,



BUDI UTAMA, S.STP., M.Si.
NIP. 19830515 200112 1 004

- Dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 0,46, realisasi sebesar 0,47 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,13%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, baik pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, maupun pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
2. Mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana secara sistematis, terintegrasi, dan akurat.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi serta pembagian peran antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang.

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana”:
 - Diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Indeks Ketahanan Daerah, dengan formulasi perhitungan:
 $(6,0\% \times \text{Indeks Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan}) + (6,0\% \times \text{Indeks Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu}) + (7,5\% \times \text{Indeks Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik}) + (10,5\% \times \text{Indeks Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana}) + (21,0\% \times \text{Indeks Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana}) + (35,0\% \times \text{Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana}) + (14,0\% \times \text{Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana}).$
 - Capaian indikator Indeks Ketahanan Daerah tersebut didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) program, yaitu Program Penanggulangan Bencana.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 0,46, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi sebesar 0,47. Dengan demikian, capaian ini telah melampaui target, dengan persentase realisasi terhadap target sebesar 102,17%.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	2
1.2 Isu-Isu Strategis (pedoman penyusunan Pohon Kinerja).....	8
1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	9
Bab II Perencanaan	14
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	14
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	15
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	16
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	16
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2025	20
Bab III Akuntabilitas Kinerja	22
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025	22
3.2 Efisiensi Anggaran	34
3.3 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025	36

3.4	Inovasi.....	41
3.5	Crosscutting	41
Bab IV Penutup		42
4.1	Kesimpulan	42
4.2	Rekomendasi	42
4.3	Rencana Aksi.....	43

Daftar Tabel

Tabel I.1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	9
Tabel I.2. Sarana-Prasarana	10
Tabel I.3. Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan 2025	13
Tabel II.1. Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023-2026	15
Tabel II.2. Strategi dan Arah Kebijakan	15
Tabel II.3. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran 2025	16
Tabel II.4. PK Kalak BPBD Prov. Kep. Bangka Belitung 2025	18
Tabel II.5. PK Komponen Anggaran Induk pada PK Kalak BPBD Prov. Kep. Babel 2025	18
Tabel II.6. PK Perubahan Kalak BPBD Prov. Kep. Bangka Belitung 2025	19
Tabel II.7. PK Perubahan Komponen Anggaran Induk pada PK Kalak BPBD Prov. Kep. Bangka Belitung 2025	19
Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	22
Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2025	23
Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	24
Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	25
Tabel III.5. Hasil Perhitungan 7 Prioritas Pengurangan Risiko Bencana	26
Tabel III.6. Rekap Peny. Dok. Teknis Kebencanaan se-Provinsi Bangka Belitung	29
Tabel III.7. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	31
Tabel III.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025	35
Tabel III.9. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025	37

Daftar Gambar

Gambar I.1. Pohon Kinerja.....	3
Gambar I.2. <i>Cascading</i> Kinerja.....	4
Gambar I.3. Peta Proses Bisnis.....	5
Gambar I.4. Struktur Organisasi.....	6
Gambar I.5. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	7
Gambar I.6. Peta Jabatan.....	8
Gambar II.1. Web BPBD Prov. Kep. Bangka Belitung.....	21
Gambar III.1. Prog. PB Keg. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Prov.	32
Gambar III.2. Prog. PB Keg. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.....	33
Gambar III.3. Prog. PB Keg. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.....	33
Gambar III.4 . <i>Crosscutting</i> BPBD Prov. Kep. Bangka Belitung.....	41

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi:

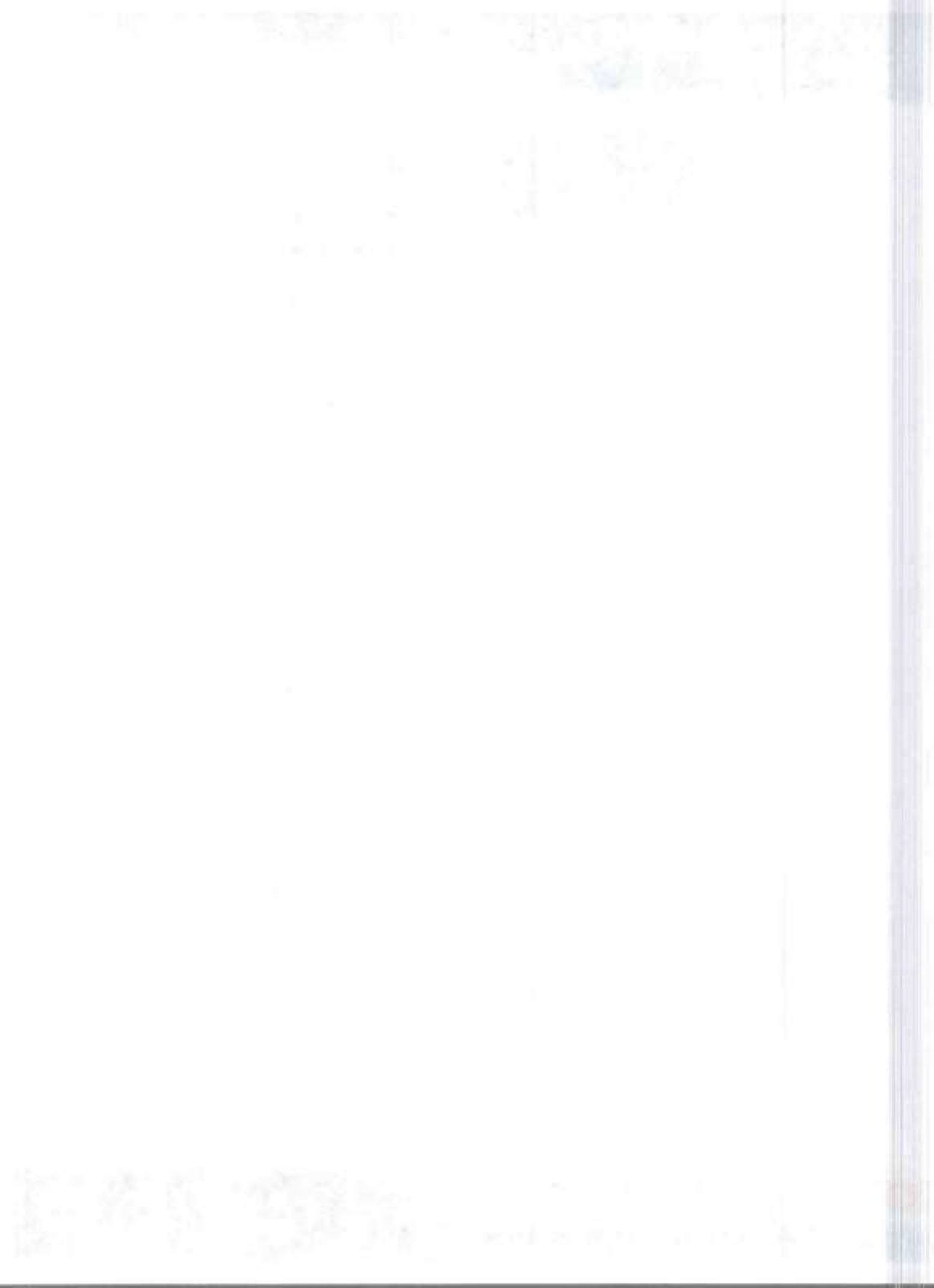
1. *Pohon Kinerja Perangkat Daerah (PD);*
2. *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi;*
3. *Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan;*
4. *Isu-Isu Strategis;*
5. *Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana, serta Anggaran;*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025.*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat ataskinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

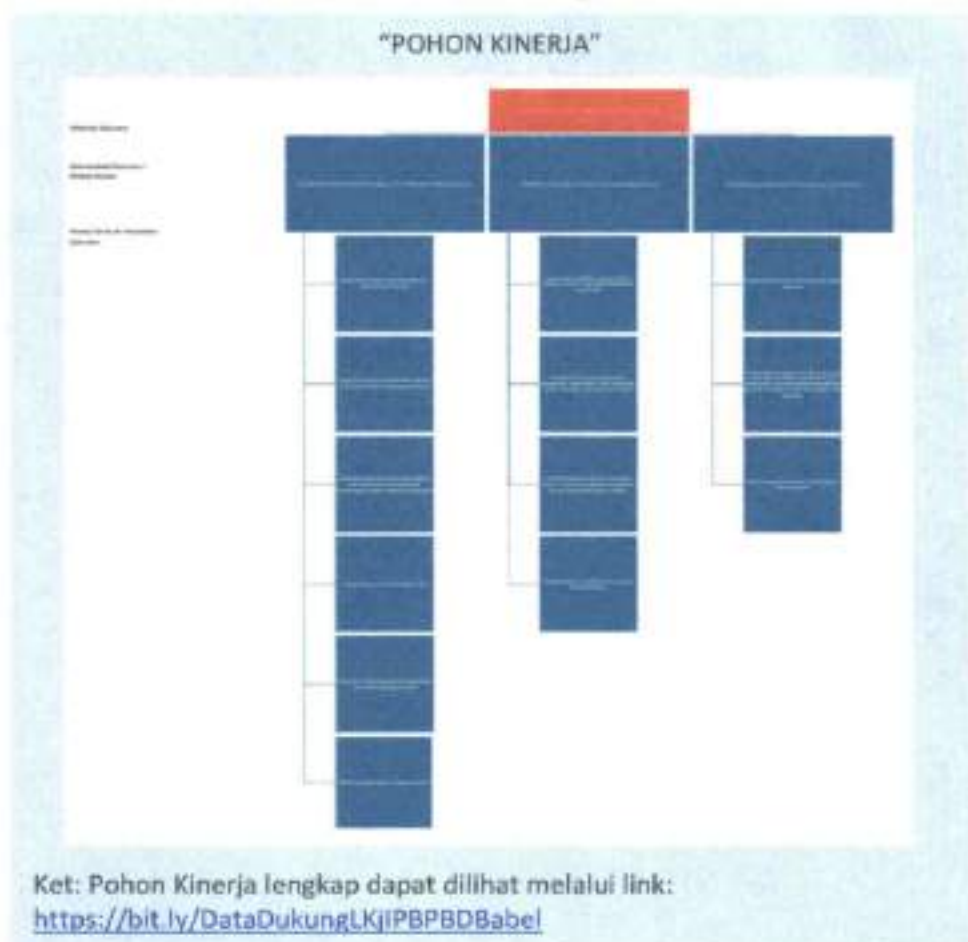


1.1 *Cascading* Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Pohon kinerja merupakan alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Penyusunan pohon kinerja pada dasarnya merupakan proses menguraikan rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian *outcome* yang diharapkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali alur logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi serta alternatif solusi dalam mencapai kinerja yang optimal. Di dalam pohon kinerja juga dapat terlihat hubungan *crosscutting* dengan instansi lain, baik instansi vertikal maupun antar perangkat daerah.

Secara teoretis, konsep pohon kinerja mengadopsi konsep model logis (*logic model*) yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang sering digunakan untuk menganalisis proses atau tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai *outcome* yang diinginkan. Pohon Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji pada gambar berikut.

Gambar 1.1. Pohon Kinerja



Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hubungan antara *cascading* kinerja, Peta Proses Bisnis, dan desain struktur organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji pada gambar berikut.

Gambar 1.2. Cascading Kinerja

"CASCADING"



Ket: Cascading lengkap dapat dilihat melalui link: <https://bit.ly/DataDukungLKIPBPBBabel>

Gambar 1.4. Struktur Organisasi



Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang menjadi dasar dalam penempatan personel pada jabatan-jabatan tertentu, sebagaimana tergambar pada gambar berikut.

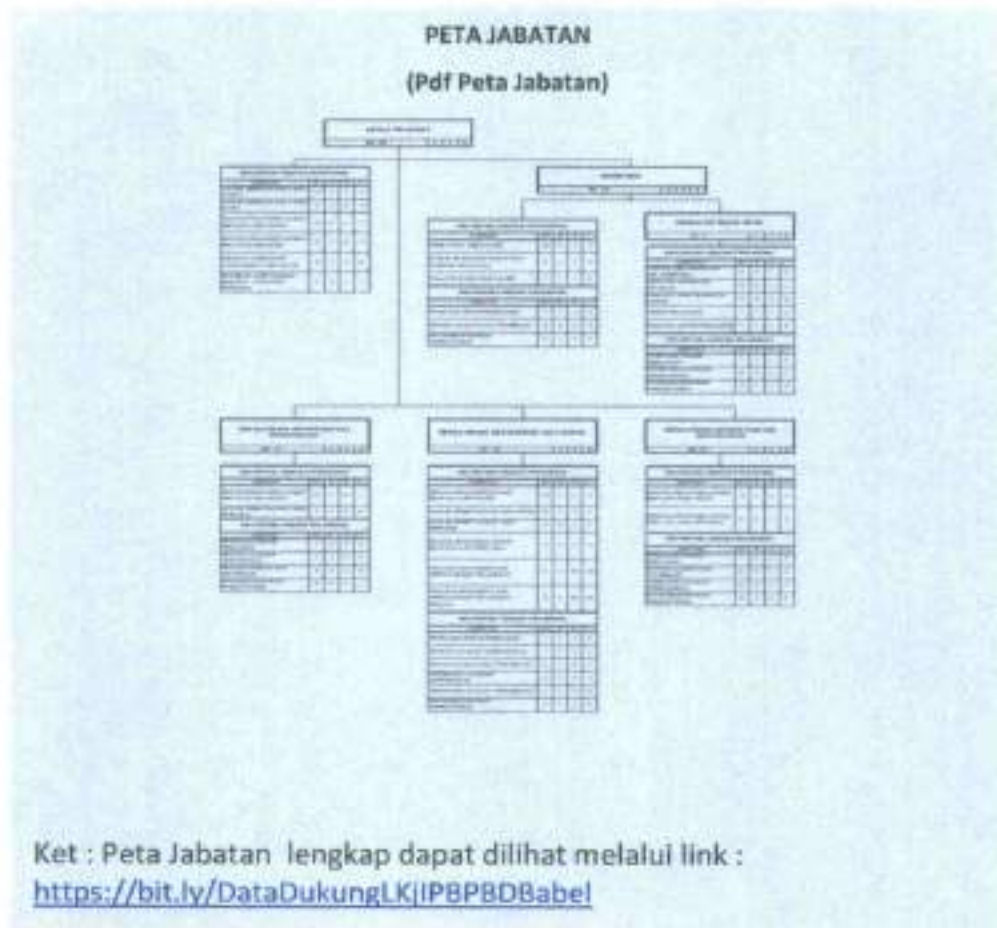
Gambar 1.5.
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada sub urusan bencana.

Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
2. Pengekoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
3. Pemberian pedoman dan pengarahan terhadap upaya penanggulangan bencana;
4. Penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
5. Penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan dan/atau bantuan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.6. Peta Jabatan



1.2 Isu-Isu Strategis (pedoman penyusunan Pohon Kinerja)

Eksistensi suatu institusi sangat bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespons isu strategis melalui berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum, isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal organisasi. Isu-isu strategis yang melingkupi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan "Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana", antara lain sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
2. Masih terbatasnya peralatan dan ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
3. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana secara sistematis, terintegrasi, dan akurat;
4. Belum optimalnya koordinasi serta pembagian peran antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No.	Jabatan	Formasi/ Peta Jabatan				Pegawai Yang Ada				Jenis Kelamin			
		Jumlah	Kualifikasi			Jumlah	Kualifikasi			L	P		
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S2	S1	D3	SMA/SMP		
A	JABATANSTRUKUTRAL	6					6	3	3			6	0
1	Kepala Pelaksana	1											
2	Sekretaris	1											
3	Kepala Bidang	3											
4	Kepala Sub Bagian	1											
B	JABATANFUNGSIONAL	99					13	11	2			8	5
1	Analisis kebencanaan Ahli Madya/Muda/Pertama	37											
2	Perencana Ahli Pertama/Muda	2											
3	Analisis Keuangan Pusat dan daerah	1											
4	Pranata Komputer	6											
5	Pranata Humas	2											
6	Analisis SDM Aparatur	1											
7	Arsiparis	2											

No.	Jabatan	Formasi/ Peta Jabatan				Pegawai Yang Ada				Jenis Kelamin		
		Jumlah	Kualifikasi			Jumlah	Kualifikasi			L	P	
			S2	S1	D3	SMA/SMP	S2	S1	D3	SMA/SMP		
8	Pranata Pencarian Dan Pertolongan	48										
C	JABATAN PELAKSANA	123					22	18	1	3	15	7
1	Penelaah Teknis kebijakan	12										
2	Penata layanan Operasional	7										
3	Pengelola Layanan Operasional	10										
4	Operator Layanan Operasional	73										
5	Pengadministrasian Perkantoran	11										
6	Pengolah data dan informasi	10										
D	PPPK/PHL						90	24	7	59	71	19

Berdasarkan data pada Tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan. Komposisi pegawai didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 56 orang (47%), disusul jenjang pendidikan S2 sebanyak 3 orang (2,2%), D3 sebanyak 10 orang (7,6%), dan SLTA sebanyak 62 orang (47,3%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan pegawai perempuan; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat oleh laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya penerapan sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2. Sarana-Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
1	Tanah		
	Tanah	2	Rp. 52.302.405,00
2	Peralatan Dan Mesin		
	Alat Besar	2	Rp. 24.681.197.922,00
	Alat Angkutan	42	Rp. 961.569.898,00

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	26	Rp. 14.995.197.319,00
	Alat Pertanian	7	Rp. 287.638.300,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	53	Rp. 18.900.000,00
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	11	Rp. 2.308.269.875,00
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	12	Rp. 2.934.415.400,00
	Alat Laboratorium	20	Rp. 27.885.000,00
	Alat Persenjataan	12	Rp. 1.417.863.282,00
	Komputer	52	Rp. 50.151.000,00
	Alat Eksplorasi	-	
	Alat Pengeboran	-	
	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	-	
	Alat Bantu Eksplorasi	-	
	Alat Keselamatan Kerja	2	Rp. 624910000
	Alat Peraga	-	
	Peralatan Proses/Produksi	-	
	Rambu-Rambu	-	
	Peralatan Olahraga	-	
3	Gedung dan Bangunan		Rp. 3.881.406.900,19
	Bangunan Gedung	1	Rp. 3.881.406.900,19
	Monumen	-	
	Bangunan Menara	-	
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		Rp. 19.016.448.084,03
	Jalan dan Jembatan	13	Rp. 4.753.050.000,00
	Bangunan Air	12	Rp. 14.015.688.084,03
	Instalasi	5	Rp. 130.396.000,00
	Jaringan	9	Rp. 117.314.000,00
5	Aset Tetap Lainnya		Rp. 31.384.000,00
	Bahan Perpustakaan	12	Rp. 2.359.000,00
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	12	Rp. 24.025.000,00
	Hewan	-	
	Biota Perairan	-	
	Tanaman	7	Rp. 5.000.000,00
	Barang Koleksi Non Budaya	-	
	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		Rp. 381.139.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		Rp. 27.400.514.961
8	Aset lainnya		Rp. 46.922.500
9	Aset Tak Berwujud		Rp. 1.140.000,00
10	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		Rp. 1.140.000,00
11	Aset Lain-lain		Rp. 46.922.500,00
12	Akumulasi Penyusutan aset lain-lain		-
13	BMD Non Neraca		Rp. 275.432.914,40
14	BMD Ekstra Komptabel		Rp. 275.432.914,40
	Total		Rp. 23.380.316.605,00

Kendaraan operasional BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 22 (dua puluh dua) unit kendaraan operasional, serta 19 (sembilan belas) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor secara umum relatif telah tersedia, meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang musala, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, *filing cabinet*, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran, dan perlengkapan lainnya telah tersedia dalam kondisi baik.

Rasio personal komputer/laptop dibandingkan dengan jumlah pegawai pada setiap bidang sudah memadai dengan mempertimbangkan kebutuhan pegawai yang diprioritaskan berdasarkan pemetaan jumlah pegawai, intensitas pekerjaan, serta kemampuan kerja pegawai. Dengan demikian, ketersediaan sarana dan prasarana secara umum sudah memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Tabel 1.3. Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan 2025

Tahun	Belanja Operasi (Rupiah)	Belanja Modal (Rupiah)	Belanja Tak Terduga (Rupiah)	Belanja Transfer (Rupiah)	Jumlah (Rupiah)
2024	13.135.279.7111	493.909.100	-	-	13.629.188.811
2025	12.079.648.518,79	129.126.600,00	-	-	12.208.775.118,79

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel 1.3. Pada tahun 2025, dibandingkan dengan tahun 2024, terdapat penurunan total anggaran belanja sebesar Rp1.420.413.692,21. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan anggaran dalam membiayai program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II berisi:

1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah;
2. Strategi dan Arah Kebijakan;
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025;
4. Indikator Kinerja Utama (IKU);
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023–2026 telah mengakomodasi dinamika program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2023–2026. Renstra tersebut ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023–2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai dengan *cascading* kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah, yaitu “Menurunnya Risiko Bencana”. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah “Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana”.

Adapun sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu lima tahun yaitu “Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana”.

Tabel II.1. Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target Tahunan					Target Akhir	Ket.
				2022	2023	2024	2025	2026	Renstra		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka/ Nilai	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,39		

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2. Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh
			Peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat akan risiko bencana dengan penguatan kebijakan dan implementasinya
			Peningkatan Sinergi antar <i>multi stakeholder</i> dalam penanggulangan bencana
	Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan handal
	Meningkatnya upaya pemulihan pasca bencana		Percepatan pemulihan pasca bencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.3. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang
1. Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	1.1. Program Penanggulangan Bencana	3.893.691.350	2.946.222.150	-947.469.200
	1.1.1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	116.899.700	44.505.200	-72.394.500
	1.1.2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.365.734.900	2.592.387.900	-773.347.000
	1.1.3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	257.793.700	257.763.300	-30.400
	1.1.4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	153.263.050	51.565.750	-101.697.300
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		3.893.691.350	2.946.222.150	3.893.691.350

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam Renstra Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselon II/perangkat daerah/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya merupakan indikator keluaran (*output*) yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Dokumen Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/260/BPBD/2023 (sebagaimana terlampir).

Sementara itu, Indikator Kinerja Individu (IKI) merupakan ukuran tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang terhadap sasaran dan tujuan yang harus dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Individu sebagai prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan Renstra Perangkat Daerah.

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja.

2.5.1 Perjanjian Kinerja 2025 (Induk)

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut.

Tabel II.4. Perjanjian Kinerja
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka/Nilai	0,46	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	0,47

Target tahunan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tidak sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2023–2026 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh capaian kinerja pada tahun 2024 yang telah melampaui target yang ditetapkan dalam kedua dokumen tersebut. Dengan demikian, penetapan target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi capaian kinerja tahun 2024 agar lebih mencerminkan kondisi aktual dan tingkat capaian kinerja organisasi.

Tabel II.5. Perjanjian Kinerja
Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket.
1.	Indeks Ketahanan Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 3.893.691.350,00	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 10.766.195.855,19	

2.5.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Pada tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu tersebut dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran, serta telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025, sehingga diperlukan penyesuaian pada kolom anggaran dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja (Kedua) Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor: BA-01/BPBD/PKP/2025, maka Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel II.6. Perjanjian Kinerja Perubahan
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka/Nilai	0,46	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	0,46

Tabel II.7. Perjanjian Kinerja Perubahan
Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket.
1.	Indeks Ketahanan Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 2.946.222.150,00	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 9.262.552.968,79	

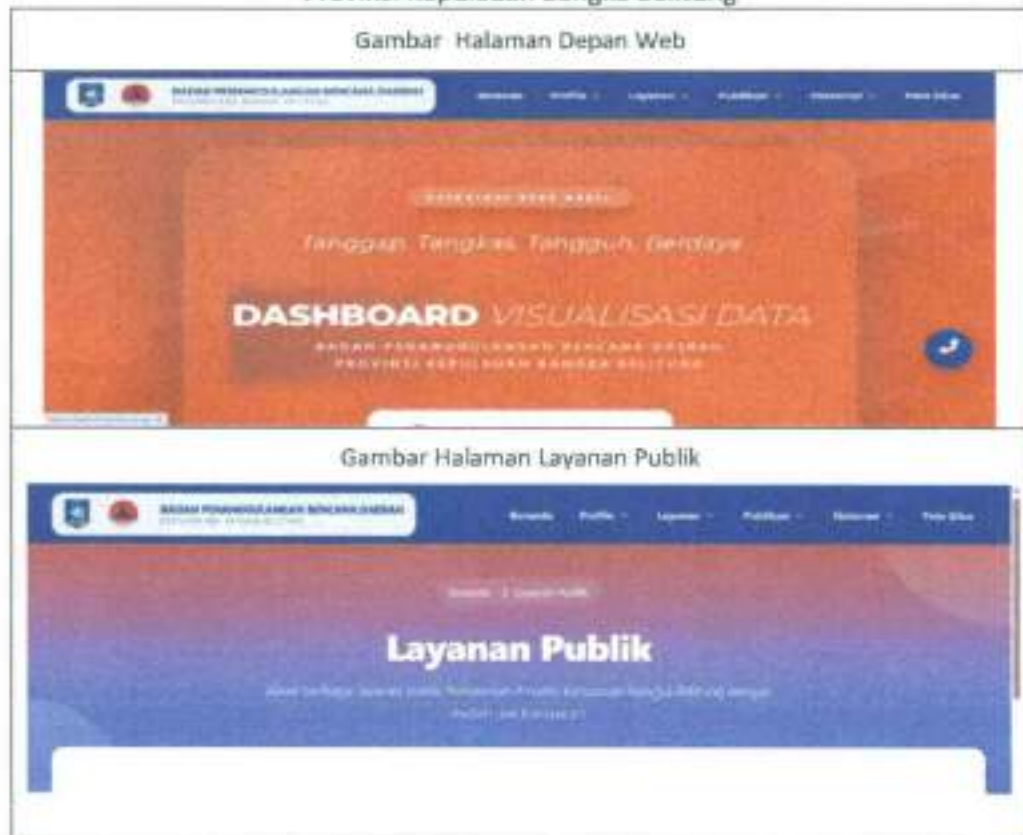
Keterangan tambahan:

1. Anggaran mengalami penurunan sebesar 20,08% sehubungan dengan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran sesuai dengan Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 903/0001/BAKUDA perihal Tindak Lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ serta pergeseran anggaran mendahului Perubahan APBD TA 2025.
2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.

2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2025

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki *website* resmi yang dapat diakses oleh pegawai maupun masyarakat umum melalui alamat <https://bpbdbabelprov.go.id>. *Website* tersebut memuat profil lengkap beserta tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, ditampilkan pula berbagai informasi mengenai kegiatan terbaru yang telah dilaksanakan. Pada *website* tersebut juga tersedia menu pengaduan, pelayanan masyarakat, serta informasi prosedur pelayanan yang disediakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk layanan publik.

Gambar II.1. Website
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab III berisi:

1. *Capaian Kinerja Tahun 2025;*
2. *Efisiensi Anggaran;*
3. *Inovasi;*
4. *Penghargaan;*
5. *Lintas Sektor (Crosscutting).*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan kinerja yang diperjanjikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025. Pengukuran kinerja tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kriteria Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator/ Metaindikator	Satuan	Base Line 2022	Base Capaian 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra
					5	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	<p>Indikator: Indeks Ketahanan Daerah</p> <p>Formula Perhitungan: $(6,0\% \times \text{Indeks Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan}) + (6,0\% \times \text{Indeks Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu}) + (7,5\% \times \text{Indeks Pengembangan Sistem Informasi, Diiklat dan Logistik}) + (10,5\% \times \text{Indeks Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana}) + (21,0\% \times \text{Indeks Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana}) + (35,0\% \times \text{Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana}) + (14,0\% \times \text{Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana}).$</p>	Angka/ Nilai	0,32	0,46	0,46	0,47	102,17	Sangat Baik	0,39	

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana

Capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana" diukur dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah. Penjelasan mengenai hubungan antara sasaran, indikator, serta formulasi perhitungan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No. 1	Sasaran 2	Indikator 3	Formulasi Perhitungan 4
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	(6,0% x Indeks Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan) + (6,0% x Indeks Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu) + (7,5% x Indeks Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik) + (10,5% x Indeks Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana) + (21,0% x Indeks Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana) + (35,0% x Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana + (14,0% x Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana).

Kinerja sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{IKD} &= (6,0\% \times \text{Indeks Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan}) + (6,0\% \times \\ &\text{Indeks Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu}) + (7,5\% \times \\ &\text{Indeks Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik}) + \\ &(10,5\% \times \text{Indeks Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana}) + \\ &(21,0\% \times \text{Indeks Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi} \\ &\text{Bencana}) + (35,0\% \times \text{Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan} \\ &\text{Penanganan Darurat Bencana}) + (14,0\% \times \text{Indeks Pengembangan} \\ &\text{Sistem Pemulihan Bencana}) \\ &= (6,0\% \times 0,65) + (6,0\% \times 0,57) + (7,5\% \times 0,58) + (10,5\% \times 0,57) + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & (21,0 \% \times 0,48) + (35,0 \% \times 0,39) + (14,0 \% \times 0,41) \\
 = & 0,04 + 0,03 + 0,04 + 0,06 + 0,10 + 0,14 + 0,06 \\
 = & 0,47
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2025, capaian kinerja sasaran ini sebesar 0,47 atau 102,17% dari target yang ditetapkan sebesar 0,46. Sumber data diperoleh dari hasil pengolahan perhitungan atas kinerja masing-masing program yang mendukung pencapaian sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator Sasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2025)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2025(%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	0,46	124,32	0,46	0,46	0,47	102,17	0,39	120,51

Analisis ketercapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- Tercapai sebesar 0,47, sehingga persentase realisasi terhadap target sebesar 102,17% (terlampau).
- Dibandingkan dengan persentase capaian tahun sebelumnya sebesar 124,32%, indikator sasaran Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana mengalami penurunan sebesar 3,81%.
- Dibandingkan dengan target akhir Renstra, diproyeksikan bahwa sasaran tersebut akan berhasil tercapai.

Ketercapaian target sasaran “Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana” dihitung berdasarkan indikator dalam *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR)* yang disepakati oleh 187 negara. Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dihitung menggunakan aplikasi InaRISK yang dikembangkan oleh BNPB, dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana. Pencapaian prioritas pengurangan risiko bencana tersebut diukur melalui 7 indikator penilaian. Penilaian Indeks Ketahanan Daerah meliputi 7 prioritas pengurangan risiko bencana, yaitu:

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan;
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik;
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; serta
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Tabel III.5. Hasil Perhitungan 7 Prioritas Pengurangan Risiko Bencana

No. 1	Prioritas 2	Nilai Indeks 3	IKD 4	Kategori 5
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,04	0,47	Sedang
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,03		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,04		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,06		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,10		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,14		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,06		

Keberhasilan capaian indikator persentase peningkatan tersebut didukung oleh program-program sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana dengan sasaran kinerja program sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana. Indikator kinerja: Persentase Penanganan Pra Bencana. Formula perhitungan indikator: $(\text{Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana} / \text{jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi}) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah: $(1/7) \times 100\% = 14,26\%$ dari target 14,26%, atau sebesar 100%. Keberhasilan capaian ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dengan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi;
 - Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana).
 - 2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - Sub Kegiatan Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
 - b. Meningkatnya upaya kedaruratan serta penyiapan logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana. Indikator kinerja: Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana. Formula perhitungan indikator: $(\text{Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana} / \text{jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana}) \times 100\%$. Capaian kinerja indikator ini adalah: $(7/7) \times 100\% = 100\%$ dari target 100%. Capaian ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
- c. Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana. Indikator kinerja: Persentase Penanganan Pasca Bencana. Formula perhitungan indikator: $(\text{Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pasca bencana} / \text{jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang terkena dampak bencana}) \times 100\%$. Capaian kinerja indikator ini adalah: $(7/7) \times 100\% = 100\%$ dari target 100%. Capaian tersebut didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Data Penduduk di Daerah Rawan Bencana Lintas Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi.

Target indikator program tersebut dapat tercapai dengan dukungan beberapa faktor, antara lain:

- Pengembangan dan penguatan faktor-faktor penanggulangan bencana, meliputi komponen kelembagaan, sistem peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana.
- Tersusunnya dokumen kebencanaan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan

bahwa penanggulangan bencana merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar pemerintah daerah pada bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana, pemerintah daerah diwajibkan menyusun dokumen teknis kebencanaan yang meliputi: Kajian Risiko Bencana (KRB); Rencana Penanggulangan Bencana (RPB); dan Rencana Kontingensi. Dokumen tersebut menjadi dasar ilmiah yang menjelaskan nilai ancaman bencana, tingkat kerentanan, serta kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, sehingga dapat menjadi landasan dalam penentuan strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) serta penyusunan kebijakan penanggulangan bencana di daerah. Selain itu, saat ini telah tersedia dokumen kebencanaan tersebut baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Tabel III.6. Rekapitulasi Penyusunan
Dokumen Teknis Kebencanaan se-Provinsi Bangka Belitung

No. 1	Kab/Kota 2	RPB 3	KRB 4	RENKON 5
1	Provinsi Kep. Bangka Belitung	√	√	√
2	Kabupaten Bangka	X	√	√
3	Kabupaten Bangka Barat	√	√	√
4	Kabupaten Bangka Tengah	X	√	√
5	Kabupaten Bangka Selatan	X	X	X
6	Kabupaten Belitung	X	√	√
7	Kabupaten Belitung Timur	X	√	X
8	Kota Pangkalpinang	X	√	√

- Respons cepat terhadap setiap kejadian bencana merupakan salah satu bentuk kewajiban pelayanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya penanganan darurat bencana secara efektif dan tepat waktu.
- Sinergitas antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, pemerintah pusat, serta para pemangku kepentingan terkait kebencanaan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), Kelurahan Tangguh Bencana (Katana), dan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Program Desa/Kelurahan/Kecamatan Tangguh Bencana merupakan salah satu program utama BNPB yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2012 dan terus dikembangkan hingga saat ini. Sampai dengan tahun 2024, telah dilaksanakan kegiatan pembentukan Kelurahan/Kecamatan Tangguh Bencana di 2 (dua) kelurahan/kecamatan yang berada di Kabupaten Bangka Barat, Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Belitung Timur.

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut :

- Pengelolaan dokumentasi data dukung yang belum optimal sehingga menyulitkan dalam proses analisis data kebencanaan.
- Revisi anggaran/*refocusing* (pengurangan dan penambahan) yang dilakukan secara bertahap mengakibatkan beberapa agenda yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan serta menimbulkan penyesuaian terhadap target *output*.

Tabel III.7. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian (Nasional)	Capaian (PD)
1.	Indeks Ketahanan Daerah $(16,0\% \times \text{Indeks Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan}) + (6,0\% \times \text{Indeks Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu}) + (7,5\% \times \text{Indeks Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik}) + (10,5\% \times \text{Indeks Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana}) + (21,0\% \times \text{Indeks Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana}) + (35,0\% \times \text{Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana}) + (14,\% \times \text{Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana})$	*	0,38	*	0,47	*	102,17

*Tidak bisa dilakukan perbandingan karena BNPB tidak pernah merilis capaian indeks Ketahanan Nasional

3.1.1.1. Data Dukung Capaian Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana melalui Program Penanggulangan Bencana

- Program Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang, yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi dengan anggaran sebesar Rp44.505.200,00.
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan anggaran sebesar Rp2.592.387.900,00.

Gambar III.1.

Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi

2. Bidang Kedaruratan dan Logistik

- a. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan anggaran sebesar Rp257.763.300,00.

Gambar III.2.
Program Penanggulangan Bencana
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

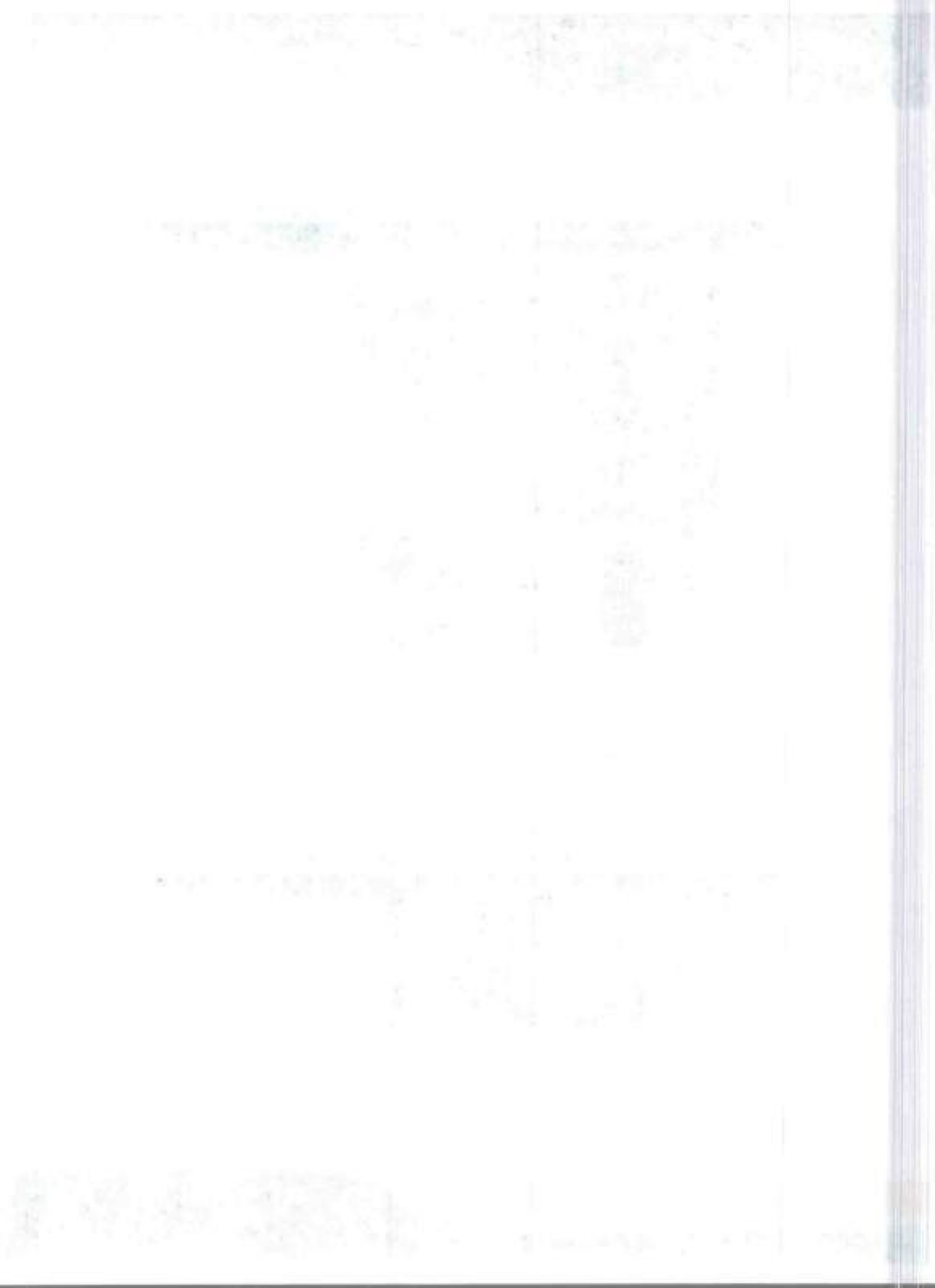
No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
2.		Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- a. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, dengan anggaran sebesar Rp51.565.750,00.

Gambar III.3.
Program Penanggulangan Bencana
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
2.		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Data Penduduk di Daerah Rawan Bencana Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,46	0,47	102,17	2.946.222.150	2.623.180.570	89,04	323.041.580
Total Belanja						2.946.222.150	2.623.180.570	89,04	323.041.580

Sumber: SIPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025, Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025

Berdasarkan Tabel III.6 di atas, capaian kinerja sasaran BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja Tahun 2025 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran sebesar Rp2.946.222.150,00, dengan realisasi sebesar Rp2.623.180.570,00 atau 89,04%. Dengan demikian, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp323.041.580,00 yang bersumber dari:

- Adanya penundaan realisasi belanja sesuai dengan Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 903/0583/BAKUDA perihal Penundaan Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2025.
- Efisiensi belanja operasi, antara lain pada belanja makan dan minum rapat, belanja honorarium narasumber dan moderator, serta belanja pemeliharaan.

3.3 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Berdasarkan Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 700/103/LHE-ITDA/2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah disusun tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel III.9. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Rencana Waktu Pelaksanaan (Bulan)	Status/Progres Penyelesaian/Output	Pelaksanaan				Link Bukti Dukung
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Menetapkan target dalam perencanaan kinerja yang dapat dicapai (<i>achievable</i>), menantang, dan realistis.	Melakukan reviu terhadap target dan capaian kinerja dalam dokumen Renstra Tahun 2023–2026 sebagai dasar dalam penetapan target pada dokumen Renstra Tahun 2025–2029.	1 Dokumen	Oktober	Selesai				1	https://bit.ly/Buktiduk-LINKHEAKIP2025
2	Agar setiap unit satuan kerja memahami dan memiliki kepedulian terhadap hasil pengukuran kinerja.	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkala di lingkungan unit organisasi BPPD.	4 Dokumen	Januari s.d. Desember	Selesai				1	

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindaklanjut	Target	Rencana Waktu Pelaksanaan (Bulan)	Status/ Progres Penyelesaian/ Output	Pelaksanaan				Link Bukti Dukung
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
3	Agar setiap pegawai memahami dan memiliki kepedulian terhadap hasil pengukuran kinerja.	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkala di lingkungan unit organisasi BPBD.	4 Laporan	Januari s.d. Desember	Selesai	1	1	1	1	
4	Perencanaan kinerja harus sepenuhnya memberikan informasi mengenai hubungan antara kinerja, strategi, kebijakan, serta aktivitas antar bidang tugas dan fungsi lain yang saling berkaitan (<i>crosscutting</i>).	Merumuskan perencanaan kinerja yang memberikan informasi mengenai hubungan antara kinerja, strategi, kebijakan, serta aktivitas antar bidang tugas dan fungsi lain yang saling berkaitan (<i>crosscutting</i>).	1 Dokumen	Oktober	Selesai				1	

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Rencana Waktu Pelaksanaan (Bulan)	Status/ Progres Penyelaksanaan/ Output	Pelaksanaan				Link Bukti Dukung
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
5	Setiap level organisasi harus melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap pengukuran capaian kinerja.	Melakukan rapat evaluasi kinerja secara berjenjang mulai dari Ketua Tim Kerja, Kepala Bidang, hingga Kepala Pelaksana.	4 Laporan	Januari s.d. Desember	Selesai	1	1	1	1	
6	Harus dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 berdasarkan Surat Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 700/103/LHE/ITDA/2025 ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Aksi Tindak	1 Dokumen	Juni	Selesai	1				

3.4 Inovasi

Tantangan global dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak secara dinamis dan kreatif. Permasalahan serta keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu munculnya gagasan dan ide-ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. WAG Kinerja, sebagai sarana untuk memudahkan koordinasi terkait pengembangan maupun permasalahan aplikasi kinerja.

3.5 Crosscutting

Crosscutting merupakan penjabaran mengenai instansi atau Perangkat Daerah yang bekerja sama dengan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

Gambar III.4.
Crosscutting BPBD Prov. Kep. Bangka Belitung



BAB 4

Penutup

Bab IV ini berisi:

1. Kesimpulan;
2. Rekomendasi;
3. Rencana Aksi,

4.1 Kesimpulan

Hasil Laporan Kinerja BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis terhadap 1 (satu) sasaran, terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja. Pada Tahun 2025, indikator kinerja "Terwujudnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana" tercapai dengan persentase sebesar 102,17%.
2. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari tersedianya data *input* untuk penghitungan Indeks Ketahanan Daerah sebagai bahan dalam penentuan sasaran, tersedianya perangkat (*tools*) InaRISK yang terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, serta terjalinnya kerja sama yang baik dengan instansi pemerintah kabupaten/kota dan pusat, masyarakat, serta pihak-pihak terkait (*stakeholder*), sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan.

4.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan upaya pengurangan risiko bencana pada wilayah rawan bencana di tingkat provinsi melalui penyusunan rencana

kontinjensi untuk jenis ancaman bencana yang menjadi prioritas di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Mengembangkan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) sebagai upaya peningkatan peran serta dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi.
4. Meningkatkan peran serta multi-stakeholder dalam upaya penanggulangan bencana melalui penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor.
5. Membangun dan mengembangkan sistem data serta informasi kebencanaan yang terintegrasi dengan sistem informasi penanggulangan bencana.

4.3 Rencana Aksi

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan harmonisasi secara intensif dengan BPBD Kabupaten/Kota, BNPB, serta *stakeholder* terkait.
2. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi hasil kegiatan agar pelaksanaannya dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dengan dinamika dan target yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal di lingkungan BPBD secara lebih intensif.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (Matriks Renstra Lima Tahun)

Tujuan dan Sasaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah terhadap bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,35	0,36	0,37	0,38

Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 J. Pemuda (28), Gedung Pradok Kal. Air Hitam Pangkalpinang, 33412
 Telp. 0713-4261146, 0717-4261147, Fax. 0717-4261146, email : bpd@provinsi-babel.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ 240 /D/2023

TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- | | |
|-----------|--|
| Menyuruh | <ul style="list-style-type: none"> a. Sejalan dengan ditemukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, serta implikasi terhadap perubahan Atas indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. b. Untuk melaksanakan pertanggung jawaban sebagai kepala dalam bentuk a. perlu ditetapkan keputusan tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026; |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033). 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Sistem Pemerintahan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471). 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243). 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678). 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80). 6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Rencana) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Rev. 2). 7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat |

- Dasar-dasar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lampiran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri U);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Perundang-undangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 45 Seri E);
 9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
 10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 16 Seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Penyelenggaraan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026;
- KEDUA** Segala surat yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan tentang Penyelenggaraan Bencana Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 Desember 2023.

KETUA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

MIKHON ANANDA, A.Ka., M.N
Pembina Utama Madya
NIP. 19790129 1999031 003

Terselenggara dan dipublikasikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala/Pejabat Pembina/Pejabat Utama di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Penyelenggaraan Pembangunan dan Statistik Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung & Pangkalpinang;

INDIKATOR KINERJA -TAMBAH
BULAN PUNANGKALAGIAN BENCANA DAGEKI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA (BELLITUNG)
TAHUN 2022 - 2026

UCAS
 P-MSB

- Profilnya Transparan: Dapat dilihat urusan yang beres
- Peraturan dan prosedur berlaku: penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
- Properitasnya pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
- Pemberita pelayanan dan prosedur: terdapat suatu penanggulangan bencana
- Prosesnya efisien: kegiatan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan
- Prosedur dan penanggulangan: di berbagai instansi beres
- Publikasi: tugas-tugas yang diberikan dan pelaksana

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA STRATEGIS		PILIHAN SASARAN/INDIKATOR KINERJA STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	
1	Meningkatkan nilai kerja sosial (SOSIAL)		Nilai 80 (Sangat Baik)		81
2	Meningkatkan Kualitas Kerja (KINERJA)		Meningkatkan Kualitas Kerja (KINERJA)		

TARGET CAPAIAN PERUBAHAN INDIKATOR UTAMA (IKU)
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2023 - 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL 2017	TARGET				
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	NA	0,36	0,37	0,38	0,39	

KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

MIKRON ANTANAKSA, A.Ks., M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19740729 199403 1 003

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Induk)


**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIKRON ANTARIKSA, A.Ks., M.Si
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUGITO
Jabatan : Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2025

PIHAK KEDUA,
PJ. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA-BELITUNG,

SUGITO

PIHAK PERTAMA,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

MIKRON ANTARIKSA, A.Ks., M.Si
Desa Utama Madya
NIRI 5140729 99403 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,46	$(5,0\% \times \text{Indeks Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan}) + (6,0\% \times \text{Indeks Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu}) + (7,5\% \times \text{Indeks Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik}) + (10,5\% \times \text{Indeks Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana}) + (21,0\% \times \text{Indeks Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana}) + (35,0\% \times \text{Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana}) + (14,5\% \times \text{Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana})$

Anggaran :

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Indeks Ketahanan Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 3.893.691.350,00	

Anggaran Penunjang (Kesekretariatan) :

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 10.766.195.855,19	

Pangkalpinang, Januari 2025

PIHAK KEDUA,
PJ. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.


SUGITO

PIHAK PERTAMA,
KELOMPOK PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.



MIKRON ANDRIKUSA, A.Ks., M.Si
Perdana Utama Madya
NIP: 19740729 199403 1 003

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
disertai dengan Berita Acara



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUDI UTAMA, S.STP., M.Si.
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Perencanaan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDYAT ARSANI
Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkabelung, November 2025

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.



HEDYAT ARSANI

PIHAK PERTAMA,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PERENCANAAN BENCANA DAERAH.



BUDI UTAMA, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19830515 200112 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,46	$(6,0\% \times \text{Indeks Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan}) + (6,0\% \times \text{Indeks Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu}) + (7,5\% \times \text{Indeks Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik}) + (10,5\% \times \text{Indeks Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana}) + (21,0\% \times \text{Indeks Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana}) + (35,0\% \times \text{Indeks Perkuatan Keselamatan dan Penanganan Darurat Bencana}) + (14,5\% \times \text{Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana})$

Anggaran :

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Indeks Ketahanan Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 2.946.222.150,00	

Anggaran Penunjang (Kesekretariatan) :

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 9.262.552.968,79	

Pangkalpinang, November 2025

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



HIDAYAT ARSANJ

PIHAK PERTAMA,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,



BUDI UTAMA, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19830515 200112 1 004

No	Uraian	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tipe Sasaran	Capaian	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										

No	Tahun	Volume Anggaran	Volume Kerja	Volume Anggaran (Rp.000)	Volume Kerja (Rp.000)	Volume Anggaran (Rp.000)	Volume Kerja (Rp.000)	Volume Anggaran (Rp.000)	Volume Kerja (Rp.000)	Volume Anggaran (Rp.000)	Volume Kerja (Rp.000)
1	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	2080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	2101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	2102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	2104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	2107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	2108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	2109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 9. Dokumen LHE Akuntabilitas Tahun 2025



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG INSPEKTORAT DAERAH

KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN PERUMAHAN RUMAH SAKIT
JL. PUSAT BELITUNG TANGERANG, ARIFUDIN TELUK, BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 28 April 2025

Nomor : 700/103/LHE/ITDA/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di
Pangkalpinang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Surat Tugas P/L Inspektur a.n. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 700/24/REV-ITDA/2025 tanggal 12 Maret 2025 hal melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ini Kami sampaikan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Ruang lingkup evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:
 - a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja; dan
 - d. Evaluasi AKIP.

3. Metodologi dan Teknik Evaluasi

- a. Metodologi evaluasi SAKIP dilakukan dengan cara kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).
- b. Teknik evaluasi yang digunakan, antara lain checklist pengumpulan data informasi, komunikasi melalui Aplikasi E Sakip, tanya dan jawab sederhana, observasi, studi dokumentasi.

4. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan nilai sebesar 73,30 dengan predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja 'Sangat Baik', yaitu terdapat gambaran bahwa AKIP sudah sangat baik pada 1/3 unit kerja. Namun demikian, masih perlu adanya perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,70	23,70
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,00	21,00
3.	Laporan Kinerja	15	10,50	12,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,50	17,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	72,70	74,20
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB
	Interpretasi : Sangat Baik			

Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dan capaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja dengan bobot 30% dari 100% dengan komponen manajemen kinerja yang dievaluasi meliputi penilaian atas dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, dan Perencanaan Kinerja dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Evaluasi terhadap perencanaan kinerja mendapatkan nilai 23,70 dari bobot 30,00 yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

1) Keberadaan

Hasil evaluasi terhadap ketersediaan dokumen perencanaan kinerja yaitu pemenuhan dokumen berupa pedoman teknis perencanaan kinerja, Renstra,

RKT, Perjanjian Kinerja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mendapat nilai 5,40 dari bobot 6,00.

2) Kualitas

Hasil evaluasi terhadap kualitas dokumen Perencanaan Kinerja dengan nilai 6,30 dari bobot 9,00, hal ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Dokumen Perencanaan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu;
- b) Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai;
- c) Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;
- d) Menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*);
- e) Setiap Unit/setuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja; dan
- f) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

Namun target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum sepenuhnya dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis.

3) Pemanfaatan

Hasil evaluasi terhadap pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja dengan nilai 12,00 dari bobot 15,00, hal ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Anggaran ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai; dan
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai dengan baik.
- d) Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu di pantau secara berkala; dan
- e) Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkontribusi dalam mencapai kinerja yang telah di rencanakan.

d. Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja dengan bobot 30% dari 100% dengan komponen manajemen kinerja yang dievaluasi meliputi pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja mendapatkan nilai 21,00 dari bobot 30,00 yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

1) Keberadaan

Hasil evaluasi terhadap ketersediaan dokumen pengukuran kinerja dengan nilai 4,20 dari bobot 6,00, hal ini menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dengan cara mengukur indikator kinerja (formula) dan memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja dalam Standar Operasional Prosedur.

2) **Kualitas**

Hasil evaluasi terhadap kualitas pengukuran kinerja dengan nilai 6,30 dari bobot 9,00, hal ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala dan pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

3) **Pemanfaatan**

Hasil evaluasi terhadap pemanfaatan pengukuran kinerja dengan nilai 10,50 dari bobot 15,00, hal ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja, dan terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

c. **Pelaporan Kinerja**

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15% dari total 100% dengan komponen manajemen kinerja yang dievaluasi meliputi pelaporan kinerja telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta ada upaya untuk perbaikan/penyempurnaan kinerja yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja.

Evaluasi terhadap pelaporan kinerja mendapatkan nilai 12,45 dari bobot 15,00, yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

1) **Keberadaan**

Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja dengan nilai 2,40 dari bobot 3,00, hal ini menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun dokumen laporan kinerja dan disusun secara berkala, disampaikan secara tepat waktu, dan telah dipublikasikan dalam Aplikasi e-SAKIP.

2) **Kualitas**

Hasil evaluasi terhadap kualitas laporan kinerja dengan nilai 4,50 dari bobot 3,60, hal ini menunjukkan bahwa Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai standar, mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

3) **Pemanfaatan**

Hasil evaluasi terhadap pemanfaatan laporan kinerja dengan nilai 6,00 dari bobot 7,50, hal ini menunjukkan bahwa Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggungjawab), dan kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja dengan bobot penilaian sebesar 25% dari total 100% dengan komponen manajemen kinerja yang dievaluasi meliputi pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai sehingga memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja. Evaluasi terhadap evaluasi akuntabilitas kinerja mendapatkan nilai 17,50 dari bobot 25,00, yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

1) Keberadaan

Hasil evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan nilai 3,50 dari bobot 5,00, hal ini menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dijadikan standar untuk melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

2) Kualitas

Hasil evaluasi atas kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan nilai 5,25 dari bobot 7,50, hal ini menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai standar.

3) Pemanfaatan

Hasil evaluasi atas pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan nilai 8,75 dari bobot 12,50, hal ini menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

5. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Menetapkan target dalam perencanaan kinerja yang dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis;
- b. Agar setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;
- c. Agar setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;
- d. Perencanaan kinerja harus sepenuhnya memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*);
- e. Setiap level organisasi harus sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja; dan
- f. Harus ada perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta jajaran dalam menerapkan SAKIP secara utuh di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari penerapan Reformasi Birokrasi.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PE. INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



IMAM KUSNADI, S.E., M.AB., CFPA., CRPF., CGCAE.
Pembina Tk. I
NIP. 197506092008121001

Tembusan:
1) Menteri PAN dan RB;
2) PJ, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

No	Arah Kebijakan, Komitmen, dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sasaran	Mula	Akhir	Tahun	Lokasi	Indikator Kinerja Utama	Lokasi
1	Membina dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berprestasi	1.1. Jumlah Pegawai yang memenuhi persyaratan kompetensi	1.1.1. Jumlah Pegawai yang memenuhi persyaratan kompetensi	0	0	0	0	100%	0
2	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai	2.1. Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	2.1.1. Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	0	0	0	0	100%	0
3	Meningkatkan kinerja pegawai	3.1. Jumlah Pegawai yang mencapai target kinerja	3.1.1. Jumlah Pegawai yang mencapai target kinerja	0	0	0	0	100%	0
4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	4.1. Jumlah Pegawai yang memberikan pelayanan publik yang memuaskan	4.1.1. Jumlah Pegawai yang memberikan pelayanan publik yang memuaskan	0	0	0	0	100%	0
5	Meningkatkan kualitas sarana prasarana	5.1. Jumlah Pegawai yang mengelola sarana prasarana	5.1.1. Jumlah Pegawai yang mengelola sarana prasarana	0	0	0	0	100%	0
6	Meningkatkan kualitas lingkungan kerja	6.1. Jumlah Pegawai yang mengelola lingkungan kerja	6.1.1. Jumlah Pegawai yang mengelola lingkungan kerja	0	0	0	0	100%	0
7	Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi	7.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola organisasi	7.1.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola organisasi	0	0	0	0	100%	0
8	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan	8.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola keuangan	8.1.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola keuangan	0	0	0	0	100%	0
9	Meningkatkan kualitas tata kelola informasi	9.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola informasi	9.1.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola informasi	0	0	0	0	100%	0
10	Meningkatkan kualitas tata kelola hubungan masyarakat	10.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola hubungan masyarakat	10.1.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola hubungan masyarakat	0	0	0	0	100%	0
11	Meningkatkan kualitas tata kelola keselamatan dan kesehatan kerja	11.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola keselamatan dan kesehatan kerja	11.1.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	0	0	100%	0
12	Meningkatkan kualitas tata kelola lingkungan hidup	12.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola lingkungan hidup	12.1.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola lingkungan hidup	0	0	0	0	100%	0
13	Meningkatkan kualitas tata kelola energi	13.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola energi	13.1.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola energi	0	0	0	0	100%	0
14	Meningkatkan kualitas tata kelola perubahan iklim	14.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola perubahan iklim	14.1.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola perubahan iklim	0	0	0	0	100%	0
15	Meningkatkan kualitas tata kelola anti korupsi	15.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola anti korupsi	15.1.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola anti korupsi	0	0	0	0	100%	0
16	Meningkatkan kualitas tata kelola pencegahan dan penanggulangan bencana	16.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola pencegahan dan penanggulangan bencana	16.1.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola pencegahan dan penanggulangan bencana	0	0	0	0	100%	0
17	Meningkatkan kualitas tata kelola manajemen risiko	17.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola manajemen risiko	17.1.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola manajemen risiko	0	0	0	0	100%	0
18	Meningkatkan kualitas tata kelola tata kelola organisasi	18.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola tata kelola organisasi	18.1.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola tata kelola organisasi	0	0	0	0	100%	0
19	Meningkatkan kualitas tata kelola tata kelola organisasi	19.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola tata kelola organisasi	19.1.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola tata kelola organisasi	0	0	0	0	100%	0
20	Meningkatkan kualitas tata kelola tata kelola organisasi	20.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola tata kelola organisasi	20.1.1. Jumlah Pegawai yang mengelola tata kelola tata kelola organisasi	0	0	0	0	100%	0

No.	Kategori			Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori
	1	2	3						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

TABLE 1: Financial Statements (in millions)

March 2011

Account	2010	2009	2008
Assets	10,000	9,500	9,000
Liabilities	8,000	7,500	7,000
Equity	2,000	2,000	2,000

Account	2010	2009	2008
Assets	10,000	9,500	9,000
Liabilities	8,000	7,500	7,000
Equity	2,000	2,000	2,000

Account	2010	2009	2008
Assets	10,000	9,500	9,000
Liabilities	8,000	7,500	7,000
Equity	2,000	2,000	2,000

